

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh krisis ekonomi tahun 1997 yang menimpa negara anggota ASEAN, melatarbelakangi pembentukan Masyarakat ASEAN. Bermula pada hal tersebut, ASEAN terdorong untuk mengintegrasikan kawasan yang memiliki daya tahan ekonomi. Tidak hanya ekonomi, isu-isu global seperti terorisme, perdagangan narkoba, kejahatan lintas batas dan kelestarian lingkungan semakin diperlukannya pembentukan masyarakat ASEAN (ASEAN Secretariat, 2017). Langkah konkrit yang telah dilakukan oleh ASEAN yaitu pada ASEAN Summit yang ke-9 di Bali, negara anggota menyetujui membentuk Masyarakat ASEAN melalui tiga pilar yakni politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya (ASEAN Secretariat, 2003).

Perlunya peningkatan kerjasama di negara-negara ASEAN dapat melalui cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN telah membuka akses bagi seluruh masyarakat di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender, pendidikan, kebudayaan, teknologi, lingkungan hidup dan kesehatan. Demi merealisasikan impian tersebut, penduduk ASEAN harus membangun rasa *we feeling* terhadap komunitas ASEAN. Rasa saling menghormati dan setia kawan perlu ditumbuhkan sehingga penduduk ASEAN menjadi masyarakat yang memiliki rasa toleransi dan peduli (ASEAN Secretariat, 2008).

Pentingnya peningkatan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara, dibutuhkan untuk mempromosikan kesadaran ASEAN dengan cara *people-to-people contact*, maka para pemimpin ASEAN sepakat untuk mendirikan *ASEAN Foundation* pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur (ASEAN Foundation, 2015). Tujuan utama *ASEAN Foundation* adalah membantu mewujudkan kesejahteraan bersama dan masa depan yang berkelanjutan bagi semua negara anggota ASEAN. *ASEAN Foundation* memiliki visi untuk mempromosikan kesadaran yang lebih besar terhadap ASEAN, dan wadah untuk berinteraksi antar masyarakat ASEAN, serta melibatkan mereka berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ASEAN (ASEAN Secretariat, 1997).

Selanjutnya, *The Vientiane Action Programme* (2004-2010) yang diadopsi pada KTT ASEAN bulan November 2004, mengupayakan integrasi komprehensif ASEAN menuju realisasi Komunitas ASEAN yang terbuka, dinamis, dan tangguh pada akhir tahun 2015 (ASEAN Secretariat, 2004). Di dalam *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, mengakui bahwa berbagai tingkat pembangunan di ASEAN memerlukan fleksibilitas yang mendorong ASEAN bergerak menuju masa depan yang lebih terintegrasi dan saling terhubung. Program ini secara khusus menyerukan peningkatan peran *ASEAN Foundation* dalam memajukan ide pembangunan politik ASEAN melalui promosi yang lebih kepada *people-to-people contacts* (ASEAN Secretariat, 2012).

Membangun rasa *we feeling* sebagai identitas ASEAN tidak semudah membalikkan telapak tangan. Identitas negara-negara anggota ASEAN sangat beragam, mulai dari bahasa, adat-istiadat, agama, kebudayaan menjadi tantangan

bagi *ASEAN Foundation*. Asumsi yang mendasari bahwa penciptaan identitas regional adalah kepentingan khusus bagi ASEAN, serta implementasi dari *ASEAN Vision 2020 in the Kuala Lumpur Declaration of 1971* yang berbunyi:

“We envision the entire Southeast Asia to be, by 2020, an ASEAN Community conscious of its ties of history, aware of its cultural heritage and bound by a common regional identity” (ASEAN Secretariat, 1971).

ASEAN berupaya menjalankan kerangka kerja regional yang dirancang sebagai aksi pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, asumsi ini akan menjadi dasar *ASEAN Foundation* sebagai rekomendasi dan strategi dalam mengembangkan partisipasi masyarakat regional.

Selanjutnya rencana *Initiative for ASEAN Integration* (IAI), bergantung pada warga negara. Penerimaan identitas regional sebagai badan kolektif yang menjamin perlindungan dan kenyamanan (Jones M. E., 2014, p. 143). *ASEAN Foundation* yang dibentuk oleh ASEAN diminta untuk mengkonseptualisasikan ulang bagaimana masyarakat ASEAN berpikir dari komunitas mana mereka berasal, dan bagaimana mereka berhubungan dengan komunitas yang lebih luas secara regional.

Visi para pemimpin ASEAN untuk membentuk Komunitas ASEAN, melalui meningkatkan jumlah kegiatan yang berkaitan dengan kaum muda di kawasan. Disinilah peran *ASEAN Foundation* untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi anak muda sebagai edukasi tentang ASEAN. Salah satunya melalui program *ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting* (AFMAM), program rutin yang dilakukan oleh *ASEAN Foundation* setiap tahunnya (ASEAN Foundation, 2008).

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan *mixed methods*. Menurut Creswell (2002), *mixed methods* merupakan pendekatan penelitian yang mencampurkan penelitian kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2002, p. 17). Metode kualitatif akan digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya ASEAN Foundation dalam menanamkan identitas regional pada pemuda melalui program AFMAM 2018 melalui konsep *organic intellectual* Neo-Gramscian yang dicetuskan oleh Robert Cox. Sedangkan, metode kuantitatif digunakan untuk melihat efektivitas kegiatan AFMAM 2018 terhadap pembangunan identitas regional pada pemuda yang mengikuti program tersebut.

Peneliti mengambil variabel berdasarkan jadwal kegiatan AFMAM 2018. Direalisasikan melalui *workshop* yang dilakukan oleh ASEAN Foundation sebagai berikut; *ASEAN Youth Participation* (X1), *Understanding ASEAN History and Arts of Diplomacy* (X2), *AFMAM experience* (X3), *ASEAN Vision* (X4), *Understanding the ASEAN Way* (X5). Sedangkan variabel terikatnya dipilih berdasarkan *objectives* (Y1), *strategy* (Y2), dan *outcomes* (Y2) yang ingin dicapai ASEAN Foundation yang kemudian ditransformasikan menjadi variabel Y.

Selanjutnya, teknik analisis statistika yang akan digunakan adalah regresi linear berganda. Teknik analisis regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor (Hidayat, 2017). Pengumpulan data responden dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dan skala *likert* sebagai alat ukur persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap serangkaian pertanyaan pada kuesioner (Sugiyono, 2008, p. 32). Berdasarkan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk meneliti upaya ASEAN Foundation dalam

membangun identitas regional pada pemuda melalui program AFMAM 2018 menggunakan analisis *organic intellectual* dan regresi linear berganda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian, yaitu :

1. Bagaimana upaya *ASEAN Foundation* dalam menanamkan identitas regional pada pemuda melalui program AFMAM 2018?
2. Seberapa efektif upaya *ASEAN Foundation* dalam menanamkan identitas regional dalam kegiatan AFMAM 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran *ASEAN Foundation* dalam membangun identitas regional pada pemuda melalui program AFMAM 2018.
2. Untuk mengetahui seberapa efektif upaya *ASEAN Foundation* dalam menanamkan identitas regional dalam kegiatan AFMAM 2018.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai identitas ASEAN telah banyak dilakukan, bahkan dalam lingkup Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun, belum ada yang membahas upaya *ASEAN Foundation* dalam membangun identitas bersama melalui program AFMAM 2018. Penelitian ini akan disajikan menggunakan metode *mixed methods*. Pada pembahasan kualitatif akan membahas *ASEAN Foundation* sebagai *organic intellectual* ASEAN, sedangkan pada pembahasan kuantitatif akan melihat dengan melihat apakah program AFMAM 2018 efektif mempengaruhi pembangunan identitas.

1.5 Cakupan Penelitian

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji tentang bagaimana upaya *ASEAN Foundation* dalam menguatkan rasa *we feeling* pada pemuda di ASEAN tahun 2018 melalui program *ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting* (AFMAM). Periode ini diambil dari tahun diberlakukannya *ASEAN Community* 2018 sebagai pembatasan periode yang tengah berlangsung. Adapun pembahasan mencakup kegiatan-kegiatan yang menunjang peran *ASEAN Foundation* dalam membangun identitas regional.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai penelitian ini berkaitan dengan pembangunan identitas regional yang dilakukan oleh ASEAN. Di satu sisi, prospek untuk lebih lanjut integrasi tampak menjanjikan untuk kelangsungan kerjasama di kawasan. (Jonsson, 2010). Persepsi publik mengenai komunitas regional ditulis oleh Ravinchandran

Moorthy dan Guido Benny (2012) menjelaskan hambatan yang akan dirasakan ASEAN dalam pembangunan identitas regional yakni rendahnya tingkat pendidikan, kesenjangan ekonomi, perbedaan dalam sistem politik dan hukum, tidak meratanya penggunaan teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam mengenalkan konsep Komunitas ASEAN (Ravinchandran & Benny, 2012). Namun, artikel ini tidak menyebutkan secara spesifik peran sub-divisi seperti *ASEAN Foundation* dalam membangun persepsi masyarakat mengenai komunitas ASEAN.

Pembangunan identitas regional diperlukannya konstitusi yang menghubungkan negara-negara anggota, seperti yang ditulis oleh Jurgen Ruland (2010) menyebutkan Konstitusi pemerintah seperti European Union menjadi fasilitator pembangunan identitas regional. Jurgen Ruland juga menyebutkan institusi menambah lapisan interaksi baru pada tata kelola global yang muncul, seperti arus informasi yang lebih efisien, interaksi intra-regional yang lebih intensif, dan memperkuat ikatan regional (Ruland, 2010).

People-to-people contact di ASEAN menjadi faktor utama dalam mengukur keberhasilan sebuah institusi dalam membangun identitas regional. Dalam artikel yang ditulis Mie Oba (2014) pencapaian *people-to-people contact* harus terdapat tatanan yang stabil antar negara dan politik dalam negeri masing-masing anggota. Sejak berdirinya ASEAN konflik senjata mulai berkurang dan para elit nasional sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai atau dikenal dengan *ASEAN Way* (Oba, 2014).

Proses terbentuk identitas regional berhubungan dengan adanya globalisasi. Jika dahulu ‘identitas regional’ diartikan hanya identitas lokal. Sekarang menjadi lokal – global. Tulisan Prof. Antoine Bailly (2017) menjelaskan transformasi identitas regional lama ke baru. Dia menyebutkan globalisasi dan fragmentasi adalah istilah dialektika baru antara global dan regional. Globalisasi telah membuat kita menemukan bentuk-bentuk kewarganegaraan lain, tidak hanya warga dunia, bangsa-bangsa, melainkan pentingnya identitas regional. Implementasi komunitas regional telah membentuk sistem dunia dan benua, contohnya Eropa memiliki asosiasi Uni Eropa (Bailly, 2017).

Setiap asosiasi regional memiliki ciri khas sendiri, begitupun dengan ASEAN yang mengenalkan pola kerjanya dengan istilah *The ASEAN Way*. Berbeda dengan Tiongkok dan Jepang, negara-negara Asia Tenggara memiliki struktur yang dibangun secara aktif untuk membentuk hubungan di wilayah mereka. Koro Bessho (2014) mengatakan alat utama integrasi identitas ASEAN yakni persamaan identitas dan keberagamannya. Dia menyebutkan ASEAN telah memainkan peran internasional penting melalui *Post-Ministerial Conferences* (PMCs) yang disebut dengan ‘*dialogue partner*’, *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan di dalam grup APEC serta *The Asia-Europe Meeting* (ASEM). Meskipun ASEAN belum mencapai model Uni Eropa, dengan adanya integrasi ASEAN telah secara aktif berusaha untuk menyelesaikan perselisihan di negara anggota (Bessho, 2014).

Pada tahun 1950-an studi integrasi regional berkembang dan menarik banyak sarjana hubungan internasional dan politik untuk melakukan eksperimen yang cukup

berani, yakni mendirikan komunitas keamanan, perdagangan bebas di kawasan, dan pasar bersama. Proses integrasi kawasan yang menjadi contoh adalah Uni Eropa. Generasi pertama, sarjana integrasi Uni Eropa bermula pada perdagangan batubara dan baja *European Coal and Steel Community* (ECSC). Kemudian komunitas ECSC menjadi *European Economic Community* (EEC). Generasi kedua berfokus pada interaksi antara lembaga-lembaga komunitas dan masyarakat. Generasi ketiga, yaitu generasi saat ini menganalisa pembuatan kebijakan publik atau meneliti proses perubahan institusi itu sendiri (Caporaso, 2011).

Terdapat ratusan proses integrasi regional yang saat ini ada di seluruh dunia, banyak di antaranya yang mampu berevolusi dengan baik, namun ada juga yang pada akhirnya kesulitan mengkoordinasi karena wilayahnya yang luas. Alex Warleigh-Lack (2015) mengklasifikasikan fase-fase proses integrasi regional. Menurutnya terdapat lima klasifikasi yakni, *regional space* (terhubung karena letak geografi) menjadi *region-state* (organisasi multi-level yang didasarkan pada kerjasama sukarela oleh negara-negara anggota, yang telah berevolusi menjadi bentuk kenegaraan yang baru) contohnya Uni Eropa. *Regional complex* yaitu wilayah yang dijalin melalui interaksi dan transaksi manusia lintas batas, *regional society* adalah sebuah regional kompleks yang telah menjadi subjek transnasional peraturan formal. Kemudian terdapat *regional community* yakni masyarakat regional yang telah mengembangkan identitas kolektif dan diakui sebagai aktor kolektif oleh negara ketiga, sebagai contohnya ASEAN (Lack, 2015).

1.7 Konsep Teori

Pendekatan *ASEAN Foundation* yang berfokus pada *people-to-people-connect* dalam membentuk identitas regional, membawa penulis untuk menggunakan konsep Neo-Gramscian. Pemikiran Robert Cox ini terinspirasi dari teori hegemoni yang diungkapkan Antonio Gramsci. Perspektif Neo-Gramscian akan membantu penulis, menjelaskan fenomena identitas regional ASEAN melalui *hegemony project*, *ideational* dan *ASEAN Foundation* sebagai *organic intellectual* yang ingin membangun *common sense* pada peserta AFMAM 2018.

Neo-Gramscian oleh Robert Cox merupakan pengembangan dari teori hegemoni Gramsci. Gagasan Gramsci berawal dari teori ekonomi dan kondisi material selalu terjadi secara bersamaan, saling mempengaruhi satu sama lain, dan tidak merugikan yang lainnya (Cox, 1983, p. 162). Menurut Gramsci, dalam pembentukan hegemoni diperlukan aparat buatan dari pemerintah yang berfungsi untuk membentuk pola perilaku masyarakat, agar mereka sukarela mengikuti perintah penguasa. Gramsci juga menyebutkan faktor sejarah seperti ajaran gereja, sistem pendidikan, media, dan semua institusi akan membantu pemerintah mencapai hegemoni yang diinginkan (Cox, 1983, p. 165).

Gerakan menuju hegemoni, Gramsci menyebutnya ‘peralihan dari struktur ke lingkungan superstruktur yang kompleks’, maksudnya adalah beralih dari kepentingan khusus suatu kelompok atau kelas ke pembangunan institusi dan ideologi akan bersifat atau berbentuk universal (Gramsci, 1971). Teori yang diungkapkan oleh Gramsci dikenal sebagai Gramscian, namun untuk melihat implementasi teori

tersebut di dunia internasional, penelitian ini akan menggunakan Neo-Gramscian yang dicetuskan oleh Robert Cox. Mengenai implikasi konsep-konsep hegemoni Gramsci menuturkan

Do international relations precede or follow (logically) fundamental social relations? There can be no doubt that they follow. Any organic innovation in the social structure, through its technical-military expressions, modifies organically absolute and relative relations in the international field too. (Cox, 1983, p. 169)

Makna '*organic*' bagi Gramsci berarti sesuatu yang struktural, jangka panjang atau relatif permanen. Gramsci mengatakan, perubahan mendasar dalam hubungan kekuasaan internasional atau tatanan dunia diamati sebagai perubahan dalam keseimbangan strategi militer dan geopolitik, dapat ditelusuri ke perubahan mendasar dalam hubungan sosial. Hegemoni dalam studi hubungan internasional diartikan sebagai dominasi suatu negara terhadap negara lain (Bieler & Morton, 2004, p. 101). Konsep *organic intellectuals* yang dimaksud oleh Gramsci adalah mereka yang dapat menarik perhatian individu, maupun kelompok melalui pengetahuan tertentu. Inti dari konsep ini yaitu membentuk narasi sejarah baru sehingga menciptakan kepentingan yang sama (Crehan, 2016, p. 5).

Proyek hegemoni dapat dilihat dari visi sosial tertentu yang menghubungkan kepercayaan, dan praktik budaya dengan pengalaman masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Tercapainya hegemoni, menunjukkan kemampuan untuk memproduksi persetujuan seperangkat hubungan sosial tertentu dari waktu ke waktu. Proyek hegemonik merupakan cara yang mampu mengintegrasikan perubahan ekonomi dan politik dengan budaya lokal dan ideologi massa yang ada (Nicholls, 1999, p. 133).

Di dalam proyek hegemoni terdapat tiga komponen, yaitu komponen material, ideasional, dan institusional. Penjelasan mengenai tiga komponen proyek hegemoni dijelaskan oleh Rakhmat (2018), dimana Cox mengambil konsep struktur historis untuk mempelajari tatanan dunia, kemudian membaginya menjadi tiga elemen penyusun (Rakhmat, 2018, p. 54) sebagai berikut:

- a) Kemampuan material, merupakan sumber daya alam dan kecakapan teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan produktif atau destruktif. Pengertian ini tidak menentukan lokasi, tidak ada anggapan bahwa kemampuan material berada di dalam negara untuk digunakan para elit jika dibutuhkan.
- b) Ide atau gagasan, terdiri dari dua jenis. Pertama, makna intersubjektif yang cenderung melanggengkan kebiasaan dan harapan perilaku. Kedua adalah gambar kolektif tatanan sosial yang dipegang oleh berbagai kelompok orang.
- c) Institusi, berfungsi sebagai sarana untuk menstabilkan, melanggengkan pesan dan mempromosikan ide-ide yang konsisten dengan tujuan menyampaikan pesan kepada khalayak umum. Institusi dapat dijadikan medan pertempuran citra kolektif yang saling bertentangan.

Konsep Neo-Gramscian memiliki dua aspek, *pertama*, ide dianggap bagian dari keseluruhan struktur sebagai kekuatan makna dari intersubjektif. Mereka membentuk konteks ide yang lebih luas, seperti mengkondisikan cara individu maupun kelompok dalam memahami situasi sosial mereka dan kemungkinan terjadinya perubahan sosial (Andreas & Morton, 2018). *Kedua*, ide dapat digunakan aktor sebagai bagian dimana kebijakan dan kepentingan tertentu dilegitimasi. Kedua aspek tersebut merupakan

komponen penting dari proyek hegemoni, yang mana dikatakan berhasil jika ide-ide legitimasinya diterima secara universal. Neo-Gramscian menyebutnya sebagai “*common sense*” yang akan menjamin legitimasi intelektual dan moral dari proyek hegemoni (Crehan, 2016).

Implementasi program *ASEAN Foundation* sebagai proyek hegemoni. Meskipun proyek hegemoni berlandaskan pada kepentingan material, akan tetapi aspek utama dari hal ini adalah menyelesaikan konflik ‘abstrak’ antara kepentingan tertentu dan kepentingan khusus (Jessop, 1983, p. 100). Pencapaian tersebut dapat dilakukan dengan adanya persetujuan negara-negara anggota. Upaya ASEAN ditunjukkan tidak terbatas pada bidang ekonomi, akan tetapi dilakukan juga pada tingkat ideasional untuk mendapatkan persetujuan masyarakat.

Perkembangan struktur sejarah berawal dari ide, kemudian tujuan *ASEAN Foundation* dalam membentuk identitas regional terbagi menjadi dua komponen, yakni; ideasional, yang berfokus pada bagaimana tujuan *ASEAN Foundation* diterjemahkan menjadi kepentingan universal oleh komunitas masyarakat ASEAN, dan struktural yang melihat kekuatan sosial yang terlibat dalam perjuangan ideologis. Pengertian komponen ideasional dan komponen struktural dijelaskan oleh (Rakhmat, 2018, pp. 62-63) sebagai berikut:

a) Komponen Ideasional: Ide dan *Common Sense*

Perspektif Neo-Gramscian memfokuskan pada gagasan, dimana mengkondisikan cara individu dan kelompok dapat memahami situasi sosial mereka, serta kemungkinan perubahan (Andreas & Morton, 2018, p. 72).

Menurut Cox (1981), ‘gagasan’ terbagi menjadi dua jenis dalam konteks Neo-Gramscian; pertama, dari sisi historis dikondisikan oleh makna intersubjektif, dan interaksi dalam pemahaman hubungan sosial, diharapkan dapat melanggengkan kebiasaan dan perilaku. Kedua, tatanan sosial dari *collective image* merupakan pandangan berbeda tentang sifat dan legitimasi hubungan kekuasaan yang berlaku. Pembentukan dasar material dan ideasional tidak mungkin muncul jika terjadi perselisihan pada *collective images* (Cox, 1981).

Common sense digunakan untuk memahami ideologi ditransformasikan, sebagai kepentingan umum masyarakat regional. Akan tetapi, dalam menyebarkan ide dan mewujudkan cita-cita tersebut, Neo-Gramscian memerlukan peran *organic intellectual* untuk menyampaikan hal tersebut. Sehingga, kepentingan yang ingin dicapai dapat dipahami oleh masyarakat sipil.

b) Komponen Struktural: *Organic intellectual*

Komponen kedua dari untaian perjuangan ideologis dari *regional historical bloc* adalah struktural. Perspektif Neo-Gramscian tidak hanya menyangkut ide-ide, akan tetapi juga melihat campur tangan struktural dalam membentuk *common sense* untuk membantuk kepentingan proyek hegemoni.

Komponen struktural ini dibangun untuk mengidentifikasi kekuatan sosial yang terlibat dalam perjuangan pembentukan identitas regional di ASEAN. Gramsci (1971) beranggapan, setiap kelompok sosial yang muncul di realita, merupakan fungsi esensial dalam dunia produksi ekonomi. Tercipta bersama dengan sendirinya, secara organik, dibantu oleh intelektual yang memberikan

pengaruh homogenitas dan kesadaran akan fungsinya sendiri. Hal tersebut tidak hanya di bidang ekonomi tetapi di bidang sosial dan politik juga (Gramsci, 1971, p. 5)

Konsep intelektual organik relevan digunakan untuk menganalisa pembentukan identitas ASEAN, melalui upaya *ASEAN Foundation* dalam membangun identitas regional. Rakhmat (2018) menjelaskan, intelektual organik tidak melulu dilakukan oleh individu, tetapi juga intelektual kolektif organik (Rakhmat, 2018, p. 64). Dalam penelitian ini penulis menyatakan *ASEAN Foundation* adalah *organic intellectual* dari ASEAN.

Perspektif Neo-Gramscian dikembangkan oleh Cox memperluas arti hegemoni. Hal tersebut diekspresikan sebagai manifestasi dalam penerimaan gagasan kemudian didukung oleh sumber daya material dan institusi. Dia menyebutkan bagaimana makna intersubjektif dan gagasan bersama mengenai hubungan sosial akan membentuk realitas. Realitas yang dimaksud oleh Cox, bukan hanya lingkungan fisik dari tindakan manusia, tetapi juga konteks kelembagaan, moral, serta ideologi yang membentuk pikiran dan tindakan. Jadi, poin penting yang harus dikemukakan adalah bahwa hegemoni meresap melalui struktur masyarakat, ekonomi, budaya, etnis, kelas dan ideologi (Bieler & Morton, 2004, p. 87).